

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan di bawah ini:

##### **4.1.1 Pengembangan Desa Wisata Bangsri Kabupaten Blora**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Bangsri Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Desa Wisata Bangsri tidak hanya ditentukan oleh potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan para *stakeholder* dalam membangun kolaborasi yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes Maju Mapan, Unit Wisata, masyarakat lokal, investor, dan *stakeholder* eksternal telah menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pengelolaan wisata.

Pengembangan Desa Wisata Bangsri berawal dari upaya pemerintah desa dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebelum berkembang menjadi desa wisata, Desa Bangsri merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan memiliki keterbatasan peluang ekonomi di luar sektor tersebut. Melalui inisiatif pemerintah desa, BUMDes, dan dukungan masyarakat,

berbagai potensi yang ada kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan dari dalam maupun luar Kabupaten Blora.

Pengembangan wisata dilakukan secara bertahap melalui pembangunan fasilitas wisata, penambahan atraksi wisata, pengembangan wahana rekreasi keluarga, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari tumbuhnya UMKM lokal, bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya aktivitas ekonomi desa. Dengan demikian, Desa Wisata Bangsri telah berhasil menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Blora yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

#### **4.1.2 Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Bangsri Kabupaten Blora**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri Kabupaten Blora telah berjalan secara efektif dan menjadi dasar terbentuknya berbagai praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan desa wisata. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholder yang terdiri atas Pemerintah Desa Bangsri, BUMDes Maju Mapan, Unit Wisata, masyarakat lokal, investor, pendamping desa, serta Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora. Kolaborasi yang terbangun tidak hanya

menghasilkan keberhasilan pengembangan wisata, tetapi juga melahirkan praktik-praktik terbaik yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan desa wisata lainnya.

Pada indikator *Face to Face Dialogue*, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan interaksi tatap muka menjadi fondasi utama dalam membangun kolaborasi antar stakeholder. Dialog dilakukan secara rutin melalui musyawarah desa, rapat koordinasi pengelola wisata, forum evaluasi kegiatan wisata, pertemuan dengan masyarakat, serta koordinasi dengan stakeholder eksternal. Pertemuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, menyelesaikan permasalahan, menyusun program kerja, dan menghasilkan keputusan bersama. Intensitas komunikasi yang tinggi membuat berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan wisata dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Selain komunikasi formal, komunikasi informal yang dilakukan melalui diskusi langsung maupun media komunikasi digital juga berperan penting dalam mempercepat koordinasi antar stakeholder. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dialog yang intensif telah menghasilkan kemitraan (*partnership*) yang kuat antar stakeholder. Hubungan kerja sama yang terbangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasarkan pada keterlibatan aktif dan kesediaan seluruh pihak untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, *Face to Face Dialogue* menjadi dasar terbentuknya *partnership* sebagai salah satu indikator *best practices* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri.

Berdasarkan temuan tersebut, praktik Musyawarah Desa Berbasis Transparansi Digital menjadi salah satu *best practices collaborative governance* yang lahir dari indikator *Face to Face Dialogue*. Musyawarah desa yang diselenggarakan secara rutin tidak hanya memperkuat komunikasi tatap muka antar stakeholder, tetapi juga didukung dengan pemanfaatan media sosial melalui siaran langsung (*live*) TikTok sebagai bentuk transparansi publik. Inovasi ini memperluas akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dan pengelola wisata. Dengan demikian, proses dialog yang berlangsung tidak hanya menghasilkan kemitraan (*partnership*) yang kuat, tetapi juga melahirkan model musyawarah desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan berpotensi direplikasi oleh desa wisata lainnya.

Pada indikator *Trust Building*, penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antar stakeholder berhasil dibangun melalui transparansi, keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan, dan konsistensi pelaksanaan program wisata. Pemerintah desa dan pengelola wisata secara rutin menyampaikan perkembangan program serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat sehingga menciptakan rasa percaya terhadap pengelolaan wisata. Selain itu, manfaat ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat melalui peningkatan peluang usaha, berkembangnya UMKM, dan bertambahnya kesempatan kerja semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wisata. Kepercayaan yang terbentuk tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah desa, tetapi juga antara masyarakat dengan BUMDes, investor, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam

pengembangan wisata. Kepercayaan yang tinggi tersebut memperkuat legitimasi dan efektivitas kepemimpinan (*leadership*) dalam menggerakkan kolaborasi. Pemerintah desa dan pengelola wisata mampu menjalankan fungsi kepemimpinan secara partisipatif karena memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat maupun stakeholder lainnya. Oleh karena itu, *Trust Building* yang berhasil dibangun dalam proses kolaborasi menjadi dasar terbentuknya *leadership* yang efektif sebagai salah satu indikator *best practices* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri.

Kepercayaan yang berhasil dibangun antar stakeholder tersebut melahirkan praktik Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai salah satu *best practices collaborative governance*. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi berperan aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengembangan desa wisata. Keterlibatan tersebut menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat legitimasi pemerintah desa dan pengelola wisata, serta menciptakan hubungan kerja sama yang didasarkan pada saling percaya. Praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama dalam proses kolaborasi.

Pada indikator *Commitment to Process*, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh stakeholder memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Bangsri. Pemerintah desa secara konsisten memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi program, BUMDes menjalankan

fungsi pengelolaan wisata, masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan wisata, sementara stakeholder eksternal memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, maupun promosi wisata. Komitmen tersebut terlihat dari keberlanjutan program yang dijalankan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan sumber daya. Semangat gotong royong yang masih kuat dalam masyarakat Bangsri menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat komitmen bersama dalam mengembangkan desa wisata. Komitmen tersebut juga tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti, pemeliharaan fasilitas wisata, partisipasi dalam event promosi wisata, serta dukungan terhadap berbagai inovasi yang dikembangkan oleh pengelola wisata. Komitmen yang berkelanjutan dari seluruh stakeholder menunjukkan adanya kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan program wisata dalam jangka panjang. Dengan demikian, *Commitment to Process* menjadi dasar terciptanya sustainability atau keberlanjutan pengembangan desa wisata yang merupakan salah satu indikator best practices.

Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder tersebut juga melahirkan praktik Kemandirian Pengelola dalam Menjalin Kerja Sama dengan Investor sebagai salah satu *best practices collaborative governance*. Pengelola desa wisata menunjukkan inisiatif yang tinggi dalam membangun jejaring kemitraan dengan investor dan berbagai pihak eksternal tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan pengelola secara mandiri melakukan komunikasi, negosiasi, dan pengembangan kerja sama yang mendukung kemajuan desa wisata. Praktik

ini menunjukkan bahwa komitmen yang berkelanjutan mampu menciptakan tata kelola yang mandiri, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan pengembangan desa wisata.

Pada indikator *Shared Understanding*, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan pengembangan Desa Wisata Bangsri. Stakeholder memahami bahwa pengembangan wisata tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan desa, memperkuat identitas desa, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kesamaan visi dan tujuan tersebut membuat stakeholder mampu menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam satu tujuan bersama. Kesepahaman juga terlihat dalam cara stakeholder memahami berbagai permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi secara kolektif melalui musyawarah dan koordinasi. Kesamaan visi, tujuan, dan mekanisme kerja yang terbangun dalam kolaborasi menghasilkan pola tata kelola yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kolaborasi yang diterapkan memiliki potensi untuk direplikasi atau ditransfer (*transferability*) ke desa wisata lainnya dengan menyesuaikan kondisi lokal masing-masing daerah. Oleh karena itu, *Shared Understanding* menjadi dasar terbentuknya *transferability* sebagai salah satu indikator *best practices* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri.

Kesamaan visi yang dimiliki seluruh stakeholder selanjutnya diwujudkan melalui dua praktik terbaik, yaitu Promosi Desa Wisata melalui Media Sosial serta

Pelestarian dan Promosi Budaya Lokal melalui Event Wisata. Kesamaan pemahaman mengenai pentingnya memperkenalkan potensi desa mendorong seluruh stakeholder memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Di sisi lain, kesamaan visi dalam menjaga identitas lokal diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai event budaya, seperti pertunjukan Barongan dan pengembangan Wisata Sejarah Noyo Gimal, yang melibatkan masyarakat, kelompok seni, pelaku UMKM, dan pemerintah desa. Kedua praktik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya tercermin pada kesamaan tujuan, tetapi juga pada kemampuan seluruh stakeholder menerjemahkan visi bersama menjadi program nyata yang dapat direplikasi oleh desa wisata lainnya.

Pada indikator *Intermediate Outcomes*, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang telah berlangsung menghasilkan berbagai capaian awal yang signifikan. Keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, berkembangnya UMKM lokal, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, bertambahnya lapangan pekerjaan, serta perbaikan fasilitas wisata yang semakin memadai. Selain manfaat ekonomi, kolaborasi juga menghasilkan manfaat sosial berupa meningkatnya partisipasi masyarakat, menguatnya hubungan antar stakeholder, serta meningkatnya rasa bangga masyarakat terhadap desanya. Berbagai capaian awal tersebut tidak hanya menjadi hasil sementara dari proses kolaborasi, tetapi berkembang menjadi dampak (*impact*) yang lebih luas terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat,

berkembangnya usaha ekonomi lokal, meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta semakin kuatnya identitas Desa Bangsri sebagai desa wisata. Dengan demikian, *Intermediate Outcomes* yang dihasilkan dari proses *collaborative governance* telah berkembang menjadi *impact* yang nyata dan berkelanjutan, sehingga menjadi salah satu indikator *best practices* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri.

Berbagai capaian tersebut merupakan akumulasi dari implementasi seluruh *best practices collaborative governance* yang diterapkan di Desa Wisata Bangsri. Musyawarah desa berbasis transparansi digital berhasil meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas, pelibatan masyarakat memperkuat rasa memiliki terhadap desa wisata, kemandirian pengelola dalam membangun kemitraan memperluas peluang pengembangan, promosi melalui media sosial meningkatkan eksposur destinasi wisata, serta penyelenggaraan event budaya berhasil memperkuat identitas lokal sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Sinergi dari kelima praktik tersebut menghasilkan dampak yang tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek melalui peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Bangsri.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* di Desa Wisata Bangsri berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan serta menjadi dasar terbentuknya berbagai *best practices* dalam pengembangan desa wisata. *Face to Face Dialogue* menghasilkan *partnership* yang kuat, *Trust Building* menghasilkan *leadership* yang efektif, *Commitment to Process* mendorong *sustainability*, *Shared Understanding* menciptakan *transferability*,

dan *Intermediate Outcomes* menghasilkan *impact* yang nyata bagi masyarakat. Hubungan antara indikator *collaborative governance* dan indikator *best practices* tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Wisata Bangsri tidak hanya terletak pada proses kolaborasinya, tetapi juga pada praktik-praktik terbaik yang lahir dari proses tersebut. Oleh karena itu, Desa Wisata Bangsri dapat dipandang sebagai contoh *best practices collaborative governance* yang berpotensi direplikasi pada pengembangan desa wisata lainnya.

Secara lebih spesifik, penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima *best practices collaborative governance* yang menjadi ciri khas pengembangan Desa Wisata Bangsri, yaitu Musyawarah Desa Berbasis Transparansi Digital, Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata, Kemandirian Pengelola dalam Menjalinkan Kerja Sama dengan Investor, Promosi Desa Wisata melalui Media Sosial, serta Pelestarian dan Promosi Budaya Lokal melalui Event Wisata. Kelima praktik tersebut lahir dari proses kolaborasi yang berjalan secara efektif sesuai dengan tahapan *collaborative governance* Ansell dan Gash, sehingga tidak hanya menjelaskan keberhasilan Desa Wisata Bangsri, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual berupa rekomendasi praktik kolaboratif yang dapat diadaptasi oleh desa wisata lain sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal masing-masing.

#### **4.1.3 *Best Practices Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa**

##### **Wisata Bangsri Kabupaten Blora**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri tidak hanya menghasilkan proses kolaborasi yang efektif, tetapi juga melahirkan berbagai praktik terbaik (*best practices*) yang menjadi faktor utama keberhasilan pengembangan desa wisata. Praktik-praktik tersebut lahir dari sinergi antara Pemerintah Desa Bangsri, BUMDes Maju Mapan, Unit Wisata, masyarakat, pelaku UMKM, investor, kelompok seni, tokoh masyarakat, serta Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Kolaborasi yang terbangun tidak hanya memperkuat tata kelola desa wisata, tetapi juga menghasilkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, kemandirian pengelolaan, pelestarian budaya, serta promosi wisata secara berkelanjutan.

Praktik terbaik pertama adalah Musyawarah Desa Berbasis Transparansi Digital. Praktik ini menunjukkan adanya inovasi dalam proses pengambilan keputusan melalui pelaksanaan musyawarah desa secara rutin yang disiarkan secara langsung melalui media sosial, khususnya TikTok. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat karena warga yang tidak dapat hadir secara langsung tetap dapat mengikuti jalannya musyawarah dan memberikan masukan. Praktik ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu

memperkuat proses collaborative governance dengan menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Praktik terbaik kedua adalah Kemandirian Pengelola dalam Menjalin Kerja Sama dengan Investor. Berbeda dengan pola yang umum ditemukan di berbagai desa wisata, pengelola Desa Wisata Bangsri secara aktif membangun komunikasi dan menjalin kemitraan dengan investor tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah daerah. Pemerintah desa dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata berperan sebagai fasilitator, sedangkan proses identifikasi peluang, pendekatan, hingga negosiasi dilakukan secara mandiri oleh pengelola desa wisata. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan jejaring kemitraan yang berorientasi pada pembangunan desa. Praktik ini mencerminkan model *community-driven collaborative governance*, yang mana masyarakat menjadi aktor utama dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

Praktik terbaik ketiga adalah Masyarakat sebagai Penggerak Utama Desa Wisata. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi berperan sebagai aktor utama dalam seluruh tahapan pengembangan desa wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga evaluasi program. Tingginya partisipasi masyarakat menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat modal sosial berupa gotong royong dan kepercayaan, serta meningkatkan keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Keberhasilan Desa Wisata Bangsri menunjukkan bahwa pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*community-driven development*) mampu menghasilkan tata kelola

kolaboratif yang lebih efektif karena seluruh pemangku kepentingan merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberhasilan desa wisata.

Praktik terbaik keempat adalah Promosi Desa Wisata melalui Media Sosial. Pemanfaatan berbagai platform digital, seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube, telah menjadi strategi promosi yang efektif dalam memperkenalkan potensi Desa Wisata Bangsri kepada masyarakat luas. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran destinasi wisata, tetapi juga sebagai media komunikasi, transparansi informasi, serta interaksi antara pengelola, masyarakat, wisatawan, dan calon investor. Strategi promosi digital tersebut terbukti meningkatkan visibilitas Desa Wisata Bangsri, memperluas jangkauan pemasaran, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Praktik terbaik kelima adalah Pelestarian dan Promosi Budaya Lokal melalui Event Wisata. Pengembangan desa wisata dilakukan dengan menjadikan budaya lokal sebagai identitas utama destinasi melalui penyelenggaraan berbagai event budaya, pertunjukan Barongan, serta pengembangan Wisata Sejarah Noyo Gimbal. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah desa, pengelola desa wisata, kelompok seni, Karang Taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan sektor pariwisata sehingga tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga

memperkuat identitas lokal, menjaga keberlanjutan warisan budaya, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kelima *best practices* tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Wisata Bangsri tidak hanya ditentukan oleh potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan seluruh stakeholder dalam membangun kolaborasi yang inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Praktik-praktik tersebut saling melengkapi dalam membentuk model *collaborative governance* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, serta mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan dalam pengembangan desa wisata.

Selain memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan Desa Wisata Bangsri, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian *collaborative governance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) tidak hanya menjelaskan proses kolaborasi, tetapi juga mampu menghasilkan praktik-praktik terbaik yang memiliki nilai inovasi, keberlanjutan, serta potensi untuk direplikasi. Dengan demikian, Musyawarah Desa Berbasis Transparansi Digital, Kemandirian Pengelola dalam Menjalin Kerja Sama dengan Investor, Masyarakat sebagai Penggerak Utama Desa Wisata, Promosi Desa Wisata melalui Media Sosial, serta Pelestarian dan Promosi Budaya Lokal melalui Event Wisata dapat dipandang sebagai model *Best Practices Collaborative Governance* yang layak diadaptasi oleh desa wisata lain dengan menyesuaikan karakteristik, potensi, dan kondisi lokal masing-masing.

#### **4.1.4 Rekomendasi Penguatan *Best Practices Collaborative Governance* Desa Wisata Bangsri yang dapat Direplikasi pada Desa Wisata Lain**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Bangsri tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan *collaborative governance* dan lahirnya berbagai *best practices*, tetapi juga oleh adanya strategi penguatan yang menjamin keberlanjutan praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan lima rekomendasi penguatan *best practices collaborative governance* yang dapat dijadikan acuan bagi desa wisata lain dalam mengembangkan tata kelola kolaboratif sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal masing-masing. Rekomendasi ini tidak dimaksudkan sebagai model yang bersifat kaku, melainkan sebagai kerangka pengembangan yang fleksibel dan adaptif sehingga dapat diterapkan pada berbagai kondisi desa wisata di Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah menerapkan musyawarah desa berbasis transparansi digital sebagai penguatan terhadap praktik Musyawarah Desa Berbasis Transparansi Digital. Desa wisata disarankan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, memperluas akses informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah yang sebelumnya hanya bersifat tatap muka dapat dikombinasikan dengan siaran langsung maupun publikasi hasil rapat melalui platform digital sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pengelolaan desa wisata. Penerapan transparansi digital juga mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses kolaborasi.

Rekomendasi kedua adalah mendorong kemandirian pengelola dalam membangun kemitraan sebagai penguatan terhadap praktik Kemandirian Pengelola dalam Menjalinkan Kerja Sama dengan Investor. Desa wisata perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola agar mampu secara proaktif membangun jejaring kerja sama dengan sektor swasta, perguruan tinggi, komunitas, media, maupun berbagai lembaga lainnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kolaborasi yang kondusif, sedangkan pengelola desa wisata menjadi aktor utama dalam mengembangkan kemitraan yang mendukung inovasi, investasi, dan keberlanjutan pengembangan desa wisata.

Rekomendasi ketiga adalah menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama pengembangan desa wisata sebagai penguatan terhadap praktik Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata. Desa wisata perlu memastikan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi potensi, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi. Pelibatan masyarakat yang konsisten akan memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*), meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan desa wisata, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pembangunan desa wisata tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga berpusat pada pemberdayaan masyarakat (*community-driven development*).

Rekomendasi keempat adalah mengoptimalkan promosi desa wisata melalui media sosial sebagai penguatan terhadap praktik Promosi Desa Wisata melalui

Media Sosial. Setiap desa wisata perlu mengembangkan strategi promosi digital yang terencana, kreatif, dan berkelanjutan melalui berbagai platform media sosial. Pengelolaan media sosial tidak hanya difokuskan pada penyebaran informasi mengenai objek wisata, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi, edukasi, promosi produk UMKM, penyampaian agenda kegiatan, serta sarana membangun citra positif desa wisata. Selain itu, kolaborasi dengan *content creator*, media lokal, komunitas digital, maupun wisatawan juga dapat menjadi strategi efektif dalam memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Rekomendasi kelima adalah mengembangkan *event* budaya sebagai identitas desa wisata sebagai penguatan terhadap praktik Pelestarian dan Promosi Budaya Lokal melalui Event Wisata. Setiap desa wisata memiliki kekayaan budaya yang berbeda sehingga perlu menjadikannya sebagai identitas utama dalam pengembangan pariwisata. Penyelenggaraan *event* budaya secara rutin, pengembangan wisata sejarah, pelestarian seni tradisional, serta pelibatan kelompok seni dan masyarakat lokal menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya yang dimiliki.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa rekomendasi penguatan *best practices collaborative governance* merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa praktik-praktik kolaboratif yang telah berhasil diterapkan

di Desa Wisata Bangsri dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kelima rekomendasi tersebut saling melengkapi dalam membentuk model tata kelola desa wisata yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Model tersebut dapat menjadi referensi bagi desa wisata lain yang ingin mengembangkan pariwisata berbasis kolaborasi dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, budaya, kelembagaan, dan potensi lokal masing-masing.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan mengenai proses *collaborative governance* dan *best practices* yang terbentuk di Desa Wisata Bangsri, tetapi juga menawarkan rekomendasi implementatif yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan desa wisata di berbagai daerah. Kontribusi tersebut memperkuat nilai praktis penelitian karena memberikan arah kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa, pengelola desa wisata, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang kolaboratif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses *Collaborative Governance*, *Best Practices Collaborative Governance*, serta rekomendasi penguatan *Best Practices Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

## **1. Bagi Pemerintah Desa Bangsri**

Pemerintah Desa Bangsri perlu mempertahankan sekaligus memperkuat praktik Musyawarah Desa Berbasis Transparansi Digital sebagai fondasi utama kolaborasi antar stakeholder. Musyawarah desa dan rapat koordinasi sebaiknya tetap dilaksanakan secara rutin minimal dua minggu sekali sesuai praktik yang telah berjalan, dengan melibatkan pemerintah desa, BUMDes Maju Mapan, Unit Wisata, Tim Maju Mapan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, kelompok seni, dan masyarakat umum dari 4 dusun yang ada di Desa Bangsri. Seluruh proses musyawarah perlu terus disiarkan secara langsung melalui media sosial resmi desa, seperti TikTok atau Facebook Live, serta didokumentasikan dalam bentuk notulen digital, infografis keputusan, dan laporan tindak lanjut yang dipublikasikan secara berkala agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah desa perlu menyusun Roadmap Pengembangan Desa Wisata Bangsri Tahun 2027–2032 yang memuat target jumlah kunjungan wisatawan, strategi pengembangan atraksi wisata, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, pengembangan UMKM, strategi promosi digital, pelestarian budaya lokal, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi setiap tahun. Pemerintah desa juga perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Desa Wisata yang bertugas melakukan evaluasi program secara berkala bersama seluruh stakeholder untuk memastikan keberlanjutan praktik kolaborasi yang telah dibangun.

## 2. Bagi BUMDes Maju Mapan, Unit Wisata, dan Tim Maju Mapan

BUMDes Maju Mapan, Unit Wisata, dan Tim Maju Mapan perlu memperkuat praktik Kemandirian Pengelola dalam Menjalin Kerja Sama dengan Investor melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan membangun jejaring kemitraan. Pengelola perlu menyusun database calon mitra yang mencakup perusahaan swasta, perguruan tinggi, komunitas, media, lembaga CSR, maupun investor potensial yang memiliki kesesuaian dengan pengembangan desa wisata.

Selain itu, pengelola perlu menyusun proposal kerja sama (*partnership proposal*) dan profil investasi desa wisata yang memuat potensi wisata, peluang investasi, bentuk kerja sama, manfaat ekonomi, serta dampak sosial yang diharapkan. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai media promosi ketika menjalin komunikasi dengan calon mitra.

Dalam aspek pemasaran, pengelola perlu menerapkan strategi promosi digital berbasis kalender konten, dengan target publikasi minimal empat hingga lima konten setiap minggu pada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Google Business Profile. Konten yang dipublikasikan sebaiknya mencakup promosi destinasi, kegiatan budaya, testimoni wisatawan, proses pengelolaan desa wisata, produk UMKM, serta agenda event yang akan diselenggarakan.

Pengelola juga perlu mengembangkan *dashboard monitoring digital* yang memuat data jumlah kunjungan wisatawan, tingkat keterlibatan media sosial (*engagement*), pendapatan wisata, perkembangan UMKM, serta hasil survei kepuasan pengunjung sebagai dasar evaluasi program setiap triwulan.

### **3. Bagi Masyarakat Desa Bangsri**

Masyarakat perlu mempertahankan praktik Masyarakat sebagai Penggerak Utama Desa Wisata melalui peningkatan partisipasi aktif dalam setiap tahapan pengembangan desa wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran dalam musyawarah desa, tetapi juga melalui keterlibatan sebagai pengelola atraksi wisata, pelaku UMKM, kelompok seni budaya, relawan kebersihan, maupun pemandu wisata lokal.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah desa bersama pengelola wisata perlu menyelenggarakan pelatihan secara berkala mengenai pelayanan wisata (*hospitality*), pemasaran digital, pengelolaan homestay, kewirausahaan berbasis pariwisata, pengemasan produk lokal, fotografi dan videografi promosi wisata, serta penggunaan media sosial sebagai sarana promosi usaha masyarakat.

Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan produk unggulan desa yang memiliki identitas khas Bangsri, seperti kuliner tradisional, kerajinan tangan, souvenir wisata, maupun produk kreatif yang mengangkat ikon Noyo Gimal sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas desa wisata.

#### **4. Bagi Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata**

Pemerintah Kabupaten Blora perlu memperkuat fungsi fasilitasi dan pendampingan terhadap desa wisata melalui program pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pendampingan tidak hanya difokuskan pada pengembangan destinasi wisata, tetapi juga diarahkan pada penguatan *Best Practices Collaborative Governance*, seperti peningkatan kapasitas pengelolaan kolaboratif, transparansi digital, pengembangan jejaring kemitraan, promosi digital, serta pelestarian budaya lokal.

Dalam aspek promosi, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan seluruh informasi mengenai Desa Wisata Bangsri ke dalam portal resmi pariwisata Kabupaten Blora, kalender *event* tahunan, media sosial resmi dinas, serta platform promosi pariwisata Jawa Tengah. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi kerja sama promosi dengan *content creator*, media massa, komunitas fotografi, asosiasi perjalanan wisata (*travel agent*), dan platform digital lainnya untuk memperluas jangkauan promosi desa wisata.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program *benchmarking* desa wisata, yaitu kegiatan studi tiru antar desa wisata di Kabupaten Blora sehingga praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di Desa Wisata Bangsri dapat dipelajari dan diadaptasi oleh desa wisata lainnya.

## 5. Bagi Desa Wisata Lain

Desa wisata lain, khususnya di Kabupaten Blora, dapat mengadaptasi lima *Best Practices Collaborative Governance* yang telah diterapkan di Desa Wisata Bangsri, yaitu Musyawarah Desa Berbasis Transparansi Digital, Kemandirian Pengelola dalam Menjalinkan Kerja Sama dengan Investor, Masyarakat sebagai Penggerak Utama Desa Wisata, Promosi Desa Wisata melalui Media Sosial, serta Pelestarian dan Promosi Budaya Lokal melalui Event Wisata.

Implementasi praktik-praktik tersebut dapat dimulai dengan membentuk forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes, kelompok pengelola wisata, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, pemuda, dan stakeholder lainnya. Forum tersebut perlu memiliki jadwal musyawarah yang rutin, mekanisme publikasi hasil rapat secara terbuka, pembagian tugas yang jelas, serta sistem evaluasi berkala.

Selanjutnya, desa wisata lain perlu mengembangkan strategi promosi digital yang konsisten, menyelenggarakan *event* budaya sesuai potensi lokal, memperkuat pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata, serta membangun jejaring kemitraan dengan sektor swasta maupun lembaga pendidikan. Meskipun demikian, proses replikasi perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, sumber daya, dan kapasitas kelembagaan masing-masing desa sehingga praktik yang diadopsi tetap relevan dan berkelanjutan.

## 6. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai *Best Practices Collaborative Governance* pada desa wisata dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian dapat diarahkan pada analisis efektivitas transparansi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pengaruh promosi media sosial terhadap keputusan berkunjung wisatawan, efektivitas model *community-driven collaborative governance*, maupun analisis keberlanjutan penyelenggaraan event budaya sebagai strategi pelestarian identitas lokal.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan model atau indeks *Best Practices Collaborative Governance* yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi bagi desa wisata di Indonesia. Penggunaan metode kuantitatif maupun mixed methods, analisis jaringan aktor (*stakeholder network analysis*), *social network analysis*, atau *Structural Equation Modeling* (SEM) juga dapat dipertimbangkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif serta memperkaya pengembangan teori *Collaborative Governance* dalam konteks pengembangan desa wisata.